

FAKTOR KETIMPANGAN AKSES SARANA BELAJAR ANAK DALAM MENGHADAPI PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG BELUM MERATA

Factors Of Inequality In Children's Access To Learning Facilities In Facing Quality Education That Is Not Yet Equitable

Silvia Ayu Tri Octavia¹, Azharina Eka Rahmawati², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

¹Email: 25040674098mhs.@unesa.ac.id

²Email: 25040674114mhs.@unesa.ac.id

³Email: indahprabawati@unesa.ac.id

⁴Email: firresuprpto@unesa.ac.id

Abstract

Inequality in children's access to learning facilities remains a major issue in achieving quality education in Indonesia, particularly in remote and underdeveloped regions. This study aims to analyze the factors contributing to this inequality and to understand the actual conditions in the field. The research employs a literature review approach by examining various scientific sources, including academic journals, books, and reports from international organizations. The findings indicate that inequality is influenced by economic factors, limited educational infrastructure, uneven distribution of teachers, and disparities in access to technology. In addition, the suboptimal implementation of education policies further exacerbates the problem. These findings highlight the need for comprehensive policies, improved supervision, and multi-stakeholder collaboration to create a more inclusive and equitable education system.

Keywords: educational inequality, learning facilities, educational equity, remote areas, education policy.

Abstrak

Ketimpangan akses sarana belajar anak masih menjadi permasalahan utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan wilayah 3T. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut serta memahami kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan laporan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta kesenjangan akses teknologi. Selain itu, implementasi kebijakan pendidikan yang belum optimal juga menjadi penyebab utama belum tercapainya pemerataan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa diperlukan kebijakan yang komprehensif, penguatan pengawasan, serta kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata.

Kata Kunci: ketimpangan pendidikan, sarana belajar, pemerataan pendidikan, daerah terpencil, kebijakan pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pondasi utama bangsa, hanya ketika sistem pendidikannya berkualitas tinggi dan diatur dengan benar, bangsa akan maju (Muvid, 2022). Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diterima oleh setiap individu. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan global yang berkelanjutan yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada Tujuan nomor 4 yaitu Quality Education yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua masyarakat. Melalui pendidikan, diharapkan generasi penerus bangsa mampu memiliki kecerdasan dan kualitas yang dapat mendorong kemajuan negara. Namun, apabila sistem pendidikan tidak dikelola secara tepat dan merata, kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian pembangunan, salah satunya melalui munculnya kesenjangan pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya kesenjangan pendidikan yang terjadi di daerah terpencil. Kesenjangan pendidikan merujuk pada perbedaan akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang dialami oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini mencakup ketidakseimbangan dalam kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak di antara berbagai kelompok sosial, ekonomi, dan geografis (Azkiyah et al., 2025).

Di Indonesia, pendidikan sering kali lebih diprioritaskan di wilayah yang mudah dijangkau oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebaliknya, pendidikan di daerah terpencil sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil tidak selalu memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan masyarakat di daerah perkotaan. Sehingga tak jarang masyarakat di daerah terpencil kurang atau bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan yang sempurna, selayaknya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya sekolah di daerah terpencil yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang memadai. Kurangnya fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, serta sarana belajar menyebabkan kualitas pendidikan di daerah tersebut menjadi tertinggal. Salah satu contoh berdasarkan laporan Kompas, seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, diduga bunuh diri hanya karena tidak memiliki biaya untuk membeli alat tulis seperti buku dan pena (Dahlia, 2026).

Hubungan antara kemiskinan keluarga dan akses sarana pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluas) di Indonesia menjadi permasalahan yang terjadi hampir setiap tahun dan terus berulang tanpa adanya solusi yang dapat diimplementasikan secara nyata. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar masalah, sehingga persoalan yang sama kembali muncul setiap tahunnya dan memerlukan perhatian serta langkah penyelesaian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Akibatnya dalam kondisi ini pemerintah harus mengambil langkah sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan terhadap keterbelakangan pendidikan yang terjadi di daerah terpencil. Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk memastikan seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Tujuan utama pemerataan pendidikan adalah menjadikan pendidikan sebagai sarana yang efektif

untuk membangun sumber daya manusia berkualitas dalam mendukung pembangunan nasional.

Masalah ketimpangan sarana belajar anak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan saling berkaitan satu sama lain, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, geografis, serta kebijakan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana anggaran dengan jumlah besar untuk sarana pendidikan, implementasi dan pengawasannya belum optimal, sehingga daerah terpencil masih menunjukkan ketimpangannya dalam sarana belajar seperti, kurangnya tenaga pendidik, fasilitas belajar serta sarana pendukung lainnya yang kurang memadai. Sehingga partisipasi anak dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas tidak bisa tercapai. Maka dari itu, pemerintah wajib mengambil kebijakan yang komprehensif sebagai solusi untuk mewujudkan pemerataan pendidikan serta mengatasi keterbelakangan pendidikan yang masih terjadi di wilayah terpencil.

Kesenjangan pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan kondisi sosial masyarakat yang beragam. Di beberapa daerah, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi terbatas, sehingga proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara optimal. Dampak dari kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan, tetapi juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat secara menyeluruh.

Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan komponen utama yang menyebabkan ketimpangan pendidikan di Indonesia dan untuk menganalisis situasi aktual di lapangan. Untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata di seluruh Indonesia, perlu dibuat rencana pemecahan masalah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program, dan strategi yang berbasis kebutuhan lokal.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur (literatur review) sebagai metode utama. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal akademik, buku artikel penelitian, serta publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik ketimpangan akses Pendidikan. Melalui proses pengumpulan, analisis dan sintesis berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan sarana belajar anak, khususnya di daerah terpencil (Andre Febrianto et al., 2024). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai temuan penelitian sebelumnya sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai permasalahan pemerataan Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia pemerataan pendidikan masih menjadi permasalahan yang cukup rumit dan belum sepenuhnya teratasi sampai saat ini. Secara umum, pemerataan pendidikan mencakup tidak hanya akses terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada setiap siswa tanpa membedakan siapa pun berdasarkan faktor ekonomi, sosial, atau geografis. Dalam praktiknya, ketimpangan pendidikan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan

dan daerah terpencil, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, kurangnya fasilitas belajar yang memadai, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan Indonesia (Sari & Jasiah, 2025), meskipun pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan akses pendidikan melalui berbagai program, ketimpangan pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan serta distribusi sumber daya yang tidak efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berusaha meningkatkan akses pendidikan melalui berbagai program, ada banyak kendala yang menghalangi implementasi program di lapangan.

Selain itu, kesenjangan pendidikan juga berdampak secara luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak tersebut meliputi rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah cenderung memiliki produktivitas yang rendah. Dengan demikian, kesenjangan pendidikan tidak hanya menjadi tantangan dalam sektor pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari permasalahan pembangunan nasional yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan segera.

Faktor utama penyebab ketimpangan pendidikan berawal dari permasalahan yang sangat mendasar yaitu, keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan. Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi umumnya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik, seperti gedung sekolah yang layak, tenaga pendidik yang kompeten, serta akses terhadap teknologi pembelajaran yang lebih maju. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas ekonomi rendah seringkali mengalami keterbatasan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas pendidikan yang cukup signifikan antar wilayah. Dengan demikian, kesenjangan sosial ekonomi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem pendidikan secara keseluruhan, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu mengurangi disparitas tersebut melalui pemerataan anggaran dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah yang tertinggal.

Keterbatasan tenaga pendidik, berdasarkan penelitian Triwiyanto dan Kusumaningrum (2025), distribusi guru di Indonesia masih belum merata, di mana daerah perkotaan cenderung memiliki jumlah guru yang lebih banyak dan lebih berkualitas dibandingkan dengan daerah terpencil. Kondisi ini, sering menjadikan satu guru harus merangkap 3 mata Pelajaran (Mapel) sekaligus, hal ini menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Selain faktor infrastruktur dan distribusi tenaga pendidik, ketimpangan akses sarana belajar juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti buku, alat tulis, perangkat teknologi, hingga akses internet. Kondisi ini semakin

memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu. Kesenjangan akses terhadap sumber daya pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya capaian pembelajaran di negara berkembang, termasuk Indonesia (World Bank, 2020).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan pendidikan, terutama melalui pemanfaatan pembelajaran daring (online learning). Namun, implementasi pembelajaran berbasis teknologi juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital (digital divide), yaitu perbedaan akses terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet. Hal ini terlihat jelas selama masa pandemi COVID-19, di mana banyak siswa di daerah terpencil mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena keterbatasan fasilitas. Ketimpangan akses teknologi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh di berbagai negara berkembang (UNESCO, 2021).

Lebih lanjut, faktor kebijakan publik juga turut berperan dalam menentukan tingkat pemerataan pendidikan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program digitalisasi pendidikan, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan anggaran di daerah tertentu, serta tidak meratanya distribusi bantuan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. Keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kualitas tata kelola serta kesesuaian program dengan kebutuhan lokal masyarakat (OECD, 2019).

Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan di Indonesia mencerminkan adanya keterkaitan yang erat antara faktor ekonomi, kondisi geografis daerah, dan keberhasilan kebijakan pemerintah. Daerah dengan infrastruktur terbatas biasanya juga menghadapi tantangan ekonomi dan kekurangan guru yang berkualitas, yang berarti siswa di sana menghadapi hambatan belajar yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah yang lebih maju. Situasi ini menyebabkan kesenjangan pendidikan antar daerah, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Jika kondisi ini terus berlanjut, daerah-daerah yang kurang berkembang akan menghadapi kesulitan yang semakin besar dalam menutup kesenjangan di bidang pendidikan dan pembangunan secara keseluruhan.

Selain itu, ketidaksetaraan pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kualitas pendidikan yang rendah akan menghambat kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan standar hidup, dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan pendidikan yang merata harus dilakukan secara komprehensif melalui pengembangan infrastruktur pendidikan, distribusi guru yang lebih merata, perluasan akses terhadap teknologi, serta kebijakan pengawasan yang lebih ketat, sehingga setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan belajar yang setara.

Ketimpangan pendidikan yang terus berlangsung akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kesenjangan sosial, serta terhambatnya Pembangunan daerah. Akibatnya daerah akan tertinggal dengan daerah lain dan akan sulit bersaing di bidang ekonomi maupun sosial. Oleh karena

itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah, seperti pemerataan Pembangunan fasilitas pendidikan, peningkatan distribusi guru ke daerah terpencil, serta penyediaan akses internet yang merata ke seluruh daerah agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketimpangan akses sarana belajar merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan kebijakan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan akses sarana belajar anak dalam menghadapi pendidikan berkualitas di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan belum sepenuhnya teratasi. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta kesenjangan akses terhadap teknologi dan informasi, khususnya di daerah terpencil dan wilayah 3T.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurang optimalnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan kebijakan, memperkuat pemerataan infrastruktur dan tenaga pendidik, serta mendorong pemanfaatan teknologi secara inklusif. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anak di Indonesia.

Upaya mengatasi kesenjangan pendidikan perlu dilakukan melalui langkah-langkah strategis seperti peningkatan anggaran pendidikan, penyediaan program beasiswa dan bantuan keuangan bagi masyarakat kurang mampu, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya upaya yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan lokal, diharapkan ketimpangan akses sarana belajar dapat diminimalisir sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Andre Febrianto, A., Siroj, R. A., & Hartatiana. (2024). Studi literatur: Landasan dalam memilih metode penelitian yang tepat. *Journal Educational Research and Development*, 1(2), 259–263.

<https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.142>

- Azkiyah, S. R., Aryola, G., & Lukitoaji, B. D. (2025). Isu kesenjangan pendidikan di daerah terpencil: Solusi untuk mewujudkan pendidikan yang merata. *Educreativa: Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan*, 1(1), 121–129.
- Dahlia, I. (2026, February 5). *Anak SD di NTT bunuh diri, ada fenomena lebih gelap dari sekadar tidak punya uang*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/anak-sd-di-ntt-bunuh-diri-ada-fenomena-lebih-gelap-dari-sekadar-tidak-punya-uang>
- Fanshur Institute. (n.d.). *Artikel jurnal pendidikan*. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/440>
- Jurnal Ilmiah Edukatif. (n.d.). *Kebijakan pemerataan guru dan kualitas pendidikan di daerah terpencil*. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/edukatif/article/view/3733>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Pendidikan di wilayah terpencil: Tantangan pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia*. https://www.setneg.go.id/baca/index/pendidikan_di_wilayah_terpencil_tantangan_pemerintah_dalam_pemerataan_pendidikan_di_indonesia_1
- Kompas. (n.d.). *Anak bunuh diri: Persoalan struktural yang harus diurai*. <https://www.kompas.id/artikel/anak-bunuh-diri-persoalan-struktural-yang-harus-diurai>
- Kompas. (n.d.). *Pemerintah diminta fokus atasi ketimpangan pendidikan*. <https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-diminta-fokus-atasi-ketimpangan-pendidikan>
- Muvid, M. B. (2022). Konsep pemerataan pembangunan pendidikan nasional sebagai alternatif kemajuan pendidikan Indonesia. *Widya Balina*, 7(2), 469–476. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.153>
- OECD. (2019). *Education policy outlook 2019: Working together to help students achieve their potential*.
- Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). *Ombudsman beberkan sulitnya akses pendidikan di NTT*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-beberkan-sulitnya-akses-pendidikan-di-ntt>
- Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). *Pemerataan pendidikan*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pemerataan-pendidikan>
- PGSD FIP Universitas Negeri Surabaya. (n.d.). *Ketimpangan akses pendidikan antara desa dan kota: Masalah klasik yang belum usai*. <https://pgsd.fip.unesa.ac.id/post/ketimpangan-akses-pendidikan-antara-desa-dan-kota-masalah-klasik-yang-belum-usai>
- Runiasih, M., & Ahmad, M. (2025). Ketimpangan pembiayaan pendidikan antar daerah di Indonesia: Kajian literatur terhadap desentralisasi fiskal dan pemerataan akses. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 839–843.
- Sari, T. N., & Jasiah. (2025). Membangun pendidikan berkeadilan mengatasi ketimpangan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1732–1740.
- Tempo. (n.d.). *Ketimpangan pendidikan di daerah 3T*. <https://www.tempo.co/politik/ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t-819928>



- Triwiyanto, T., & Kusumaningrum, D. (2025). Ketimpangan distribusi guru sekolah dasar negeri dan pemerataan akses mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 188–214. <https://doi.org/10.52316/jap.v21i2.607>
- UNESCO. (2021). *Education and COVID-19: Recovering learning losses*.
- UNICEF. (n.d.). *Goal 4: Quality education*. <https://data.unicef.org/sdgs/goal-4-quality-education/>
- World Bank. (2020). *The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses*.
- Zaidah, A., & Parozak, M. R. G. (2025). Mobilitas sosial dan ketimpangan: Kajian tentang akses pendidikan sebagai instrumen perubahan status. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 4(5), 486–492. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1654>